

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KANDRIS KECAMATAN BENUA LIMA KABUPATEN BARITO TIMUR

Amalia Suprianti¹, Reno Affrian², Barkatullah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: amaliasuprianti@gmail.com

ABSTRAK

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah ditambah kurangnya pengawasan yang jelas dari aparat pemerintah tentang bahaya membuang sampah sembarangan yang dapat membuat lingkungan tercemar, minim sosialisasi dengan masyarakat tentang cara mengelola sampah yang baik, sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah yang belum lengkap yang pada akhirnya masyarakat sesuka hati membuang sampah di hutan maupun di jalanan.

Penelitian ini memberikan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan pengelolaan dan faktor penghambat serta factor pendukung. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan dataanya dengan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Adapun untuk sumber data tersebut diambil melalui penarikan secara *purposive sampling* berjumlah 12 orang. .

Hasil penelitian bahwa implementasi belum berjalan dengan baik, adapun indikator yang belum berjalan dengan baik antara lain: Pertama, kejelasan standar dan sasaran kebijakan. Kedua, ukuran standar dan sasaran kebijakan. Ketiga, sumber daya non manusia. Keempat, keterlibatan organisasi informal. Kelima, dukungan kondisi sosial. Keenam, dukungan kondisi ekonomi. Ketujuh, dukungan kondisi politik. Sedangkan indikator yang berjalan dengan baik antara lain: Pertama, sumber daya manusia. Kedua, keterlibatan organisasi formal. Ketiga, tanggapan pelaksana kebijakan yang cukup baik. Keempat, tingkan komitmen pelaksana kebijakan yang cukup baik. Kelima, dukungan instansi lain yang cukup baik. Keenam, tingkat koordinasi dengan instansi lain yang cukup baik. Faktor-faktor penghambatnya yaitu informasi yang diberikan mengenai standar dan sasaran kebijakan serta ukuran dan standar sasaran kebijakan belum disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat, kesadaran masyarakat yang masih minim, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di desa. Adapun faktor-faktor pendorongnya yakni sumber daya yang mencukupi untuk ukuran Desa Kandris serta kemudahan bagi masyarakat karena sampah yang akan dibuang ke TPS akan dijemput dari rumah ke rumah masyarkat yang ikut serta dalam pembuang sampah dengan di fasilitasi desa menggunakan kendaraan roda 3. Selain itu terjalinnya keterlibatan organisasi formal yang baik antara dinas terkait, kecamatan dan pemerintah desa dan menciptakan tanggapan pelaksana kebijakan yang cukup baik disertai komitmen para pelaksana yang cukup baik yang menghasilkan tingkat koordinasi yang cukup baik.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Sampah, Kebijakan.

ABSTRACT

Lack of public awareness in waste management plus the lack of clear supervision from government officials about the dangers of littering which can pollute the environment, lack of socialization to the community on how to facilities and infrastructure in waste management that are not complete which in the end people throw garbage in the forest or on the streets at will. This study aims to find out how the implementation of waste management policies in Kandris Village, Benua Lima District, East Barito Regency and the inhibiting and driving factors of the implementation of waste management policies in Kandris Village, Benua Lima District, East Barito Regency.

Study aims to with find out how is the implementation of waste management policies in Kandris Village, Benua Lima District, East Barito Regency and the inhibiting and driving factors. This research is uses a qualitative in approach with a descriptive type. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation. The data source was taken through purposive sampling of 12 people.

The results of this study show that the implementation has not gone well, the indicators that have not gone well include: First, the clarity of standards and policy objectives. Second, the standard size and policy

objectives. Third, non-human resources. Fourth, the involvement of informal organizations. Fifth, support for social conditions. Sixth, support for economic conditions. Seventh, support for political conditions. Meanwhile, indicators that are running well include: First, human resources. Second, the involvement of formal organizations. Third, the response of policy implementers is quite good. Fourth, increase the commitment of policy implementers who are quite good. Fifth, the support of other agencies is quite good. Sixth, the level of coordination with other agencies is quite good. The inhibiting factors are the information provided regarding policy standards and objectives as well as the size and standards of policy objectives have not been clearly socialized to the community, public awareness is still minimal, lack of community participation in waste management in villages. The driving factors are sufficient resources for the size of Kandris Village and convenience for the community by the village using 3-wheeled vehicles. In addition, the establishment of good formal organizational involvement between relevant agencies, sub-districts and village governments and creating a fairly good policy implementation response accompanied by a good enough commitment of the implementers which results in a fairly good level of coordination.

Keywords: *Implementation, Waste Management, Policy.*

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah menjadi isu penting yang terjadi seiring dengan perkembangan dan aktivitas pembangunan yang terus meningkat. Permasalahan ini sudah menjadi permasalahan nasional yang mengharuskan pengelolaannya dapat dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah melalui Undang-Undang No. Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menggunakan kewenangannya memberikan landasan hukum dan kejelasan tanggung jawab guna mengurangi permasalahan sampah di Indonesia (Sabarno, 2021).

Pengelolaan sampah perlu dikelola dengan benar agar kedepannya membawa banyak manfaat bagi masyarakat, sehat masyarakatnya, bersih dan terawat lingkungannya, serta aman karena kebersihan lingkungan masyarakatnya. Dari waktu ke waktu jumlah penduduk di Desa Kandris terus mengalami peningkatan yang juga mempengaruhi produksi timbulan sampah. Adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 pasal 3 tentang dari Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk dapat mewujudkan suatu lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan kesadaran dan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan.

Terdapat 3 alasan yang mempengaruhi timbulnya sampah, yakni tingkat konsumsi, pendapatan dan kepadatan penduduk. Dalam menyelesaikan permasalahan mengenai sampah, pemerintah telah mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah dengan tujuan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan. Kebijakan ini, setelah dirumuskan dan diimplementasikan, dibuat untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan hal itu. Taufiqurokhman dalam Sabarno (2021) tentang studi kebijakan publik memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan menjadi sangat kompleks dan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak, serta bagaimana pemerintah mengendalikan masalah yang muncul karena kebijakan tersebut, serta mendapatkan respons positif dan dukungan dari masyarakat, semuanya menjadi sangat penting.

Selain itu, masih terjadi kebiasaan masyarakat membuang sampah dengan sembarangan, seperti di saluran air, pinggir jalan, dan di depan rumah, meskipun sudah ada larangan sesuai pasal 52 dalam peraturan daerah yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang: (membuang sampah disembarang tempat atau pembuangan-pembuangan pada tempat lain selain yang telah ditentukan dan disediakan) (Sabarno, 2021). Oleh karena itu, sosialisasi diperlukan agar masyarakat memahami dengan baik dan benar prosedur pengelolaan sampah.

Dari data yang peneliti peroleh menunjukkan jumlah sampah yang berada di Kabupaten Barito Timur sebanyak 16,849. 28 ton/tahun. Kemudian, sampah yang berada di Kecamatan Benua Lima berjumlah 420. 8085 ton/tahun. Sedangkan, jumlah sampah yang ada pada Desa Kandris berjumlah 405.223 ton/tahun.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, yaitu dengan data atau informasi dalam penelitian kemudian diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian ataupun kesimpulan berdasarkan teori-teori, konsep-konsep maupun logika yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan diharapkan semua itu dapat terjawab terhadap semua rumusan masalah dalam penelitian.

Dengan menggunakan purposive sampling, peneliti memilih 10 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Teknik pengumpulannya melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen, juga dokumentasi. Dan Kondensasi data, menampilkan data, serta membuat kesimpulan, dan memverifikasinya adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi data yang didapatkan (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Uji Kredibilitas penelitian diperiksa dengan menggunakan bahan referensi, melakukan member check, menganalisis kejadian negatif, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan memperpanjang atau memperluas pengamatan (Sugiyono, 2023).

PEMBAHASAN

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

a. Standar Kebijakan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kejelasan standar dan sasaran kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kandris belum baik diketahui secara jelas oleh masyarakat di Desa Kandris dikarenakan tidak adanya sosialisasi secara khusus untuk mendapatkan tentang standar dan sasaran kebijakan pengelolaan sampah secara rinci.

Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2023: 133-136), menjelaskan ada enam variabel implementasi. Dari variabel standar dan sasaran kebijakan indikatornya yakni tentang kejelasan standar dan sasaran kebijakan yang harus jelas, agar tidak terjadinya konflik.

b. Sasaran Kebijakan

Dari hasil penelitian tentang sasaran kebijakan dapat disimpulkan bahwa ukuran dan standar kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kandris belum baik, karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui secara baik dan jelas, ukuran standar dan sasaran kebijakam pengelolaan sampah tersebut, justru yang lebih mengetahui adalah mereka yang memili jabatan maupun kewenangan terhadap hal tersebut, baik dari DLH maupun Kepala Desa. Karena itu, tentunya tidak sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2023: 133-136), yang menjelaskan ada enam variabel implementasi, variabel standar dan dari sasaran kebijakan indikatornya ialah kejelasan ukuran dan standar kebijakan yang menyangkut keberhasilan suatu implementasi, jika dari hal tersebut tidak ada kejelasan ukuran pengelolaan sampah akan menyebabkan terjadinya konflik antara pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Dari Sumber daya manusia sudah baik, sebagian masyarakat di Desa Kandris turut serta mendukung pengelolaan sampah di Desa Kandris. Masyarakat juga tidak perlu repot-repot mengantar sampah cukup mengantongi sampah yang akan diangkut di depan rumah. Kemudian, dari petugas kebersihan akan menjemput sampah dari rumah ke rumah. Dengan hal ini, kedepannya akan menggiatkan dan meningkatkan kesadaran diri dari masyarakat Desa Kandris agar tidak lagi membuang sampah sembarangan. Tentunya ini sudah sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023: 133-136) yang menjelaskan bahwa ada 6 variabel implementasi, salah satunya yaitu sumber daya.

b. Sumber Daya Non Manusia

Desa Kandris belum baik dari segi sarana dan prasarana ataupun finansialnya belum cukup atau memadai, maka untuk kebijakan pengelolaan sampah belum bisa dijalankan. Tentunya tidak sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) menjelaskan bahwa ada 6 variabel implementasi, salah satunya adalah sumber daya non manusia. Sumber daya non manusia menyangkut sarana dan prasarana, finansial, dan sebagainya sehingga jika belum lengkap maka akan menghambat jalannya suatu implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Keterlibatan Organisasi Formal

Keterlibatan organisasi formal baik dari dinas terkait maupun dari pemerintah Desa Kandris sudah cukup bagus, maka kebijakan pengelolaan sampah hampir bisa dijalankan. Sudah sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) yang menjelaskan ada 6 variabel implementasi, salah satunya adalah karakteristik agen pelaksana yang berindikator keterlibatan organisasi formal. Hal ini menyangkut keterlibatan dengan dinas terkait ataupun organisasi tersebut, apabila pihak tersebut sudah terlibat maka jalannya suatu implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kandris bisa dijalankan dengan bertahap sedikit demi sedikit.

b. Keterlibatan Organisasi Informal

Keterlibatan organisasi informal di Desa Kandris untuk pelaksanaan keterlibatannya masih kurang sebab, kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat yang enggan membayar iuran ketika mengangkut sampah dan kurang mendukung kegiatan ini lebih memilih membuang sampah ke hutan, lahan warga, ataupun belakang rumah dengan sesuka hati. Ini tidak sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) yang menjelaskan bahwa ada 6 variabel implementasi, salah satunya adalah karakteristik agen pelaksana yang berindikator keterlibatan organisasi informal. Hal ini menyangkut keterlibatan oleh masyarakat di Desa Kandris belum dapat terlaksana dengan baik.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

1. Tanggapan Pelaksana Kebijakan

Dari tanggapan pelaksana kebijakan pengelolaan sampah tersebut turut mendukung strategi dan kebijakan pengelolaan sampah, namun dalam hal tanggapan terhadap pelaksanaan pengelolaan

sampah secara menyeluruh memang belum bisa dikatakan dengan baik karena keterbatasan dana yang mempengaruhi pengadaan dari segi sarana dan prasarana.

Sudah sesuai teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) menjelaskan bahwa ada 6 variabel implementasi, salah satunya adalah Sikap a (*disposition*) para pelaksana yang berindikator tanggapan pelaksana kebijakan dikarenakan perlu adanya respon dari implementor terhadap kebijakan pengelolaan sampah.

2. Tingkat Komitmen Pelaksana Terhadap Kebijakan

Para pelaksana dari kebijakan sudah mempunyai komitmen yang cukup bagus dalam menjalankan kebijakan dari pengelolaan sampah meskipun masih ada kurang dari segi fasilitas kelengkapan sarana dan prasarana, namun dengan adanya komitmen tersebut tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Desa Kandris dapat tercapai satu per satu.

Sudah sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) yang menjelaskan bahwa ada 6 variabel implementasi, salah satunya adalah sikap ataupun kecenderungan (*disposition*) dari para pelaksana yang berindikator tingkat komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kandris.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Dukungan Instansi Lain

Dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kandris mulai mendapat dukungan dari instansi lain walaupun masih tergolong minim. Harapannya sedikit-demi sedikit memudahkan proses dari implementasi kebijakan dan juga strategi pengelolaan sampah. Ini sudah sesuai dengan teori menuut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) yang juga menjelaskan bahwa ada 6 variabel implementasi, salah satunya adalah yang berindikator Dukungan instansi lain demi tercapainya keberhasilan tujuan yang diinginkan.

2. Koordinasi Dengan Instansi Lain

Koordinasi yang dijalani dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sudah cukup optimal. Ini sudah sesuai dengan dari teori Van Meter dan Van Horn dalam Agustio (2023:133-136) yang menjelaskan ada 6 variabel implementasi, salah satunya Pelaksana yang berindikator tingkat koordinasi instansi lain karena menyangkut kelancaran jalannya suatu implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kandris.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

1. Kondisi Sosial

Dukungan kondisi sosial masyarakat Desa Kandris masih kurang baik mendukung pengelolaan sampah, meskipun sebagian masyarakat masih ada yang tidak ikut kegiatan ini harapannya masyarakat yang tidak ikut lama kelamaan akan termotivasi untuk ikut dalam pengangkutan sampah yang dikelola tersebut. In tidak sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) yang menjelaskan ada 6 variabel implementasi, salah satunya dari indikator kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan atau implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masih belum optimal berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kurangnya partisipasi masyarakat yang turut mendukung kegiatan pengelolaan sampah yang ada di desa ini. Meskipun, masyarakatnya tergolong banyak yang mampu, sebagian masyarakat juga tidak berinisiatif untuk memiliki tempah sampah sendiri sebab sudah menjadi kebiasaan membuang sampah ke hutan. Dengan ini tentunya belum mendukung kelancaran pengelolaan sampah di Desa Kandris.

Ini tidak sesuai dengan teori menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) yang menjelaskan ada 6 variabel implementasi, salah satunya yaitu dari indikator kondisi ekonomi mempengaruhi terhadap pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan. Karena dengan perekonomian yang baik maka akan lebih memudahkan bagi pihak pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

3. Kondisi Politik

Dukungan politik pengelolaan sampah di Desa Kandris belum baik dan masih minim, bahkan banyak masyarakat yang belum mengetahuinya secara jelas karena masyarakat beranggapan bahwa dukungan tersebut harus berbentuk dalam wujud benda yang nyata bukan dari peraturan yang dikeluarkan dan tidak secara jelas disampaikan kepada masyarakat, padahal dari pemerintah sudah memberikan dari segi dukungan dan anggaran, tetapi terkadang hal itu belum bisa diakomodir dengan baik dan terealisasi dengan baik disebabkan ada keperluan lain yang lebih dibutuhkan masyarakat. Tidak sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) yang menjelaskan ada 6 variabel implementasi, salah satunya dari indikator kondisi politik mempengaruhi terhadap implementasi suatu kebijakan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Faktor Penghambat

a. Kejelasan Standar dan Sasaran Kebijakan

Pada pelaksanaannya masih kurang karena minimnya informasi yang didapat dari masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai standar dan sasaran kebijakan pengelolaan sampah secara spesifik, masyarakat hanya mengetahui perihal pengelolaan sampah secara mendasar.

Berdasarkan hasil observasi penyebab ketidaktahuan masyarakat mengenai standar dan sasaran kebijakan pengelolaan sampah ialah informasi yang didapat masyarakat dari desa terbatas karena kurangnya informasi melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat yang menimbulkan kebingungan pada masyarakat, sebab mereka belum diberitahu secara spesifik bagaimana sasaran dan kebijakan tersebut.

Ini tidak sesuai dari teori menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) yang mengatakan bahwa sub variabel standar dan sasaran dalam kebijakan variabel harus terlihat jelas, agar nantinya tidak menimbulkan konflik.

b. Ukuran Standar dan Sasaran Kebijakan

Adapun dari Faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kandris, yaitu masih terdapat banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas mengenai ukuran standar dan sasaran kebijakan tersebut, karena tidak adanya penyampaian informasi secara jelas dari pemerintah desa langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi diatas terlihat bahwa sampah yang ada pada masyarakat Desa Kandris tidak terpilah secara benar karena tidak adanya sosialisasi mengenai cara-cara pemilahan sampah yang benar, dan karena program ini terbilang baru berjalan dan adanya iuran ketika ingin ikut membuang sampah dengan fasilitas desa, sebagian masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi dan memilih untuk membuang sampah secara sembarangan.

c. Sumber Daya Non Manusia

Adanya Sumber daya non manusia mempengaruhi dalam keberhasilan suatu implementasi, seperti kurangnya fasilitas yang ada membuat masyarakat berfikir bahwa kasus ini adalah kewajiban pemerintah desa untuk melengkapinya sebab, sudah ada dana yang diberikan oleh pemerintah untuk dikelola dengan baik yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat seperti penyediaan tong sampah, APD, dan hal lainnya.

Hal ini tidak sesuai dengan teori menurut pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) bahwa sub variabel sumber daya dengan indikator sumber daya non manusia turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.

d. Keterlibatan Organisasi Informal

Keterlibatan organisasi informal di suatu daerah sangat mempengaruhi sebuah implementasi, jika keterlibatannya tinggi maka dapat dipastikan sebuah implementasi berhasil dijalankan, namun jika keterlibatan organisasi informal nya memang rendah hal ini tentu menghambat jalannya sebuah implementasi dalam suatu daerah dikarenakan implementasi tersebut tidak dijalankan oleh pelaksana kebijakan secara baik.

Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) bahwa sub variabel karakteristik agen pelaksana dengan indikator keterlibatan organisasi informal turut mendorong untuk keberhasilan dalam implemetasi kebijakan.

e. Dukungan Sosial

Faktor penghambat pada sub variabel lingkungan sosial, ekonomi, atau politik dengan indikator dukungan sosial masih kurang. Sebagian masyarakatnya lebih banyak memilih tidak ikut membuang sampah dengan desa karena enggan jika ikut membuang harus membayar iuran sedangkan melihat kondisi ekonomi semuanya mampu membayar iuran tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penyebab adalah masyarakat mempunyai lahan tersendiri untuk membuang sampah, masyarakat yang belakang rumahnya langsung dengan hutan lebih cenderung membuang ke hutan tanpa repot mengeluarkan biaya iuran untuk ikut membuang sampah dengan fasilitas desa. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya membuang sampah sembarangan.

Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) yang mengatakan bahwa sub variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dengan indikator kondisi ekonomi disebut lingkungan eksternal yang turut mendorong keberhasilan dari kebijakan publik.

f. Dukungan Kondisi Ekonomi

Masih kurang baik segi dukungan ekonomi meskipun banyak masyarakat yang tergolong mampu, namun lebih banyak masyarakat yang memilih tidak ikut kegiatan pengelolaan sampah. Maka tidak sesuai dengan teori menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136)

bahwa sub variabel dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dengan indikator kondisi ekonomi disebut lingkungan eksternal yang mendorong keberhasilan dari kebijakan publik.

e. Dukungan Politik

Masih kurangnya dukungan politik dalam pengelolaan sampah di Desa Kandris padahal jika alasannya terbentur karena anggaran alasan tersebut dapat diatasi jika anggaran dikelola untuk pengelolaan sampah bisa diakomodir dengan baik. Ini tidak sesuai dengan teori menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) yang mengatakan bahwa sub variabel lingkungan sosial, ekonomi, atau politik disebut lingkungan eksternal turut juga mendorong keberhasilan kebijakan publik.

2. Faktor Pendorong

a. Sumber Daya Manusia

Indikator dari sumber daya manusia sudah dapat terlihat baik karena dari kegiatan ini terus berjalan, dengan sumber daya manusia yang mencukupi turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Hal ini sesuai dengan teori menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) yang mengatakan keberhasilan sebuah proses dari implementasi kebijakakan sangat bergantung dengan kemampuan sumber daya manusia.

b. Keterlibatan Organisasi Formal

Karakteristik agen pelaksana sudah cukup baik terlihat dari keterlibatan organisasi formal yang turut mendukung pengelolaan sampah di Desa Kandris. Sudah sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) yang mengatakan bahwa suatu keberhasilan proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana.

c. Tanggapan Pelaksana Kebijakan

Dari tanggapan pelaksana kebijakan pengelolaan sampah tersebut turut mendukung strategi dan kebijakan pengelolaan sampah, namun dalam hal tanggapan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah secara menyeluruh memang belum bisa dikatakan dengan baik karena keterbatasan dana yang berpengaruh terhadap sarana dan prasarana. Menurut teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) sudah sesuai dengan mengatakan bahwa sikap atau kecenderungan (*Disposition*) pelaksana sudah banyak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik.

d. Dukungan Instansi Lain

Dukungan dari instansi lain sudah cukup berjalan dengan baik karena adanya terjalin kerja sama yang turut mendukung kegiatan pengelolaan sampah berjalan dengan baik. Sudah sesuai dengan teori menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) untuk melihat keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan dipengaruhi dengan tanggapan pelaksana kebijakan.

e. Koordinasi dengan Instansi Lain

Adapun dalam koordinasi yang dijalani dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah sudah cukup bagus sehingga suatu pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Menurut teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) yang mengatakan bahwa dengan indikator koordinasi dengan instansi lain mempengaruhi tingkat keberhasilan proses implementasi dalam kebijakan public.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Kandris belum berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara yang belum berjalan sesuai dengan indikator yaitu: Pertama, kejelasan standar dan juga sasaran kebijakan. Kedua, dari ukuran standar dan sasaran kebijakan. Ketiga, menurut sumber daya non manusia. Keempat, keterlibatan organisasi informal. Kelima, dukungan kondisi sosial. Keenam, dukungan kondisi ekonomi. Ketujuh, dukungan kondisi politik. Sedangkan kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan indikator yaitu: Pertama. Sumber daya manusia yang mencukupi. Kedua, terjalannya keterlibatan organisasi formal dengan baik. Ketiga, adanya tanggapan pelaksana kebijakan yang cukup baik. Keempat, adanya tingkat komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang cukup baik. Kelima, adanya dukungan dari instansi lain yang cukup baik. Keenam, tingkat koordinasi dengan instansi lain yang sudah cukup baik.

. Faktor yang menghambat proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah antara lain: Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah secara jelas. Kedua, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Ketiga, sarana dan prasarana serta fasilitas petugas kebersihan yang belum lengkap karena terbentur anggaran. Keempat, anggaran dana desa untuk pengelolaan sampah yang kurang terakomodir dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mendorong proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah antara lain: Pertama, kemudahan masyarakat dari petugas kebersihan yang menjemput sampah dari rumah ke rumah. Kedua, terjalannya keterlibatan antara pemerintah desa dengan pihak Kecamatan dengan baik. Ketiga, tanggapan pelaksana kebijakan yang cukup baik dan berharap pengelolaan sampah di Desa Kandris lebih baik. Keempat, komitmen dari pelaksana untuk terus menghimbau masyarakat dan mengupayakan melayani masyarakat dalam pengangkutan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2008. *Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.

Anonim, 2020. *Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah*.

Anonim, 2022. *Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*.

Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ainah, N. *et al.* (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EPEFEKTIVITAS PENGELOLAAN



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.

Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

Fatimah, F. and Ghalib, S. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN*

PEMBANGUNAN, 13(2), pp. 116–123.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) ‘Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Hasbiyah, S. (2022) ‘IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU’, *Administratus*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) ‘IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) ‘Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.

Husaini, M. (2022) ‘Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) ‘IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) ‘Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control’, *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.

Jumaidi, J. (2025) ‘PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.

Junaidi, J. (2025) ‘INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) ‘Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) ‘PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) ‘Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)’, *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.

Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) ‘Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI “GUSI”)', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

Orbawati, O. (2025) ‘KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) ‘PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN



SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.

Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.

Damanhuri, P. d. 2014. *Diklat Pengelolaan Sampah*. Bandung: Teknil Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Dr. H. A. Daradjat Kartawidjaja, M. S. 2023. *Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mutiarin, A. Z. 2016. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR.

Nusrah, Wahdatun. 2023. *Implementasi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Sungai Durait Tengah Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Skripsi S1 pada STIA Amuntai: tidak diterbitkan.

Abdoellah, Awan Y. dan Rusfiana, Yudi. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sabarno, Hari. 2021. *Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur*. Skripsi S1 pada Universitas Lambung Mangkurat: tidak diterbitkan.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B Cetakan ke-26*. Bandung: Alfabeta.



Wahyudi, M. Rizman. 2022. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Desa Karang Putih dan Kelurahan Pulau)*. Skripsi S1 pada STIA Amuntai: tidak diterbitkan.